



PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PENGUATAN PEMBINAAN PERSONIL
KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI DALAM BIDANG KEPABEANAN**

Disusun Oleh :

NAMA : HENI MULYONO, S.T

NDH : 20240707012349

INSTANSI : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN 2024

**STRATEGI PENGUATAN PEMBINAAN PERSONIL
KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI DALAM BIDANG KEPABEANAN**

Oleh :

HENI MULYONO, S.T

No. Absen : 20240707012349

Menyetujui


Tanggal, November 2024

COACH


PARLINDUNCAN, S.E., MT.Ak

NIP. 197605162005011005

MENTOR


DADAN, S.H., M.H.

KOMBES POL NRP. 69040340

RINGKASAN

STRATEGI PENGUATAN PEMBINAAN PERSONIL KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI DALAM BIDANG KEPABEANAN

Oleh :

HENI MULYONO, S.T

No. Absen : 20240707012349

Proyek perubahan dengan judul "Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanan" berfokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut, khususnya dari perspektif kepabeanan. Kolaborasi antara Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Bea Cukai Maluku merupakan inovasi strategis yang diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kepabeanan di wilayah perairan Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang dari proyek ini adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan personil patroli dalam memahami aspek kepabeanan. Meskipun personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri telah memiliki dasar pengetahuan mengenai hukum laut dan prosedur patroli, mereka belum mendapatkan pembinaan yang terfokus pada penegakan hukum di laut dari perspektif kepabeanan. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam menangani pelanggaran kepabeanan yang sering kali terjadi di wilayah perairan, seperti penyelundupan barang dan pelanggaran bea masuk.

Dalam konteks penegakan hukum di laut, kepabeanan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa segala bentuk aktivitas yang terkait dengan ekspor dan impor barang, termasuk pengiriman barang melalui jalur laut, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bea Cukai sebagai otoritas yang berwenang dalam bidang ini memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam hal peredaran barang-barang ilegal, manipulasi dokumen kepabeanan, dan upaya penyelundupan. Namun, tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai aspek kepabeanan ini, personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran tersebut.

Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan melibatkan Bea Cukai Maluku sebagai mitra strategis dalam pembinaan personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Melalui kerja sama ini, personil Ditpolair akan mendapatkan pelatihan langsung dari para ahli Bea Cukai yang berpengalaman dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan. Pelatihan ini mencakup dua aspek utama, yaitu teori dan praktik. Dari segi teori, personil dibekali dengan pengetahuan mengenai regulasi kepabeanan, prosedur penegakan hukum, serta peran dan fungsi Bea Cukai dalam mengawasi aktivitas di wilayah perairan. Sementara itu, dari segi praktik, personil akan dilatih untuk mengidentifikasi pelanggaran kepabeanan, melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dicurigai, serta memahami prosedur legal dalam menangani barang-barang yang terlibat dalam pelanggaran.

Dengan pembinaan yang lebih terstruktur dan mendalam, diharapkan personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas patroli di perairan. Peningkatan kompetensi ini akan membuat mereka lebih siap dan responsif dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan, mulai dari penyelundupan barang hingga pelanggaran aturan bea masuk. Lebih lanjut, pembinaan ini tidak hanya menambah pengetahuan teknis personil, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam berkolaborasi dengan instansi lain, terutama Bea Cukai, dalam upaya bersama menjaga keamanan laut.

Proyek perubahan ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Dirjen Bea dan Cukai. Penegakan hukum di laut sering kali melibatkan berbagai stakeholder external, termasuk otoritas maritim lainnya salah satunya Bea dan Cukai. Sinergi yang kuat dengan Bea Cukai menjadi sangat penting mengingat tugas kepabeanan yang langsung berhubungan dengan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan pengiriman barang melalui jalur laut. Melalui kerja sama yang lebih erat, diharapkan penegakan hukum di laut dapat berjalan lebih efektif, dengan masing-masing instansi dapat saling mendukung dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kepabeanan.

Tujuan dari proyek perubahan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan teknis personil, tetapi juga mencakup peningkatan koordinasi dan kerja sama antar-stakeholder. Melalui peningkatan kerja sama dengan Bea Cukai, personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri diharapkan dapat lebih memahami peran masing-masing instansi dalam penegakan hukum di laut, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman pelanggaran kepabeanan. Sinergi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia.

Selain itu, inovasi dalam proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra dan kredibilitas Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan di lapangan. Dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya perdagangan internasional, tantangan dalam penegakan hukum di laut menjadi semakin kompleks. Dengan adanya pembinaan yang terfokus pada aspek kepabeanan, Kepolisian Perairan diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut.

Secara keseluruhan, proyek perubahan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dalam menjaga keamanan laut, khususnya dalam konteks penegakan hukum kepabeanan. Peningkatan kemampuan personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam

Polri melalui pembinaan langsung dari Bea Cukai Maluku akan memberikan dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum di laut. Selain itu, sinergi yang terjalin antara Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Dirjen Bea dan Cukai akan menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dalam menjaga keamanan perairan Indonesia, sekaligus meningkatkan kerjasama antar-stakeholder dalam menghadapi berbagai ancaman pelanggaran kepabeanan di masa depan.

Proyek ini juga merupakan bentuk inovasi dalam instansi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, di mana pendekatan pembinaan yang melibatkan instansi lain sebagai mitra strategis merupakan langkah yang proaktif dalam meningkatkan kualitas personil dan sinergi antar-institusi. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek terkait peningkatan kemampuan personil, tetapi juga menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dalam penegakan hukum di laut, khususnya di bidang kepabeanan.

KATA PENGANTAR

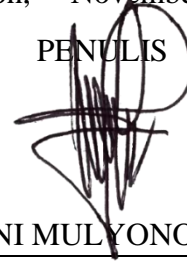
Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat, karunia dan berbagai kemudahan yang penulis rasakan hingga laporan proyek perubahan yang berjudul “Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai Dalam Bidang Kepabeanan” ini dapat terselesaikan. Selama menempuh Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan, penulis memperoleh dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Parlindungan, S.E., MT.Ak. selaku *Coach* selama penulis menempuh PKN TK. II, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta pembelajaran dalam penyelesaian tugas ini. Penulis mendapatkan banyak hal dan melebihi apa yang dapat diselesaikan dalam proses Pendidikan ini.
2. Bapak Kombes Pol Dadan, S.H., M.H. selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat kepada penulis.
3. Seluruh staf pengajar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas ilmu dan didikan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh personel jajaran Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan PKN T.K. II.
5. Seluruh rekan-rekan peserta Pendidikan PKN T.K. II khususnya Angkatan XXXI Tahun 2024 atas dukungan dan kebersamaannya selama perkuliahan.
6. Seluruh rekan-rekan Ditjen Bea dan Cukai Maluku yang telah mendukung berjalannya proses proyek perubahan ini.
7. Seluruh Tim Efektif dan abk KP. Yudistira-8003 yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan proyek perubahan ini.

Banyak pengetahuan, pengalaman dan bantuan yang telah penulis dapatkan selama penulis menyelesaikan studi. Penulis menyadari penulisan, penyusunan, dan isi buku laporan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan maupun kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Ambon, November 2024

PENULIS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the word 'PENULIS'.

HENI MULYONO, S.T

AKBP NRP 71050435

DAFTAR ISI

RINGKASAN	III
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	4
I.3 Manfaat	6
I.4 Ruang Lingkup	8
I.5 Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan	8
BAB II PERENCANAAN PROYEK PERUBAHAN	9
II.1 Deskripsi Pelaksanaan Proyek Perubahan	9
II.2 Output Proyek Perubahan	12
II.3 Tata Kelola Proyek Perubahan	13
II.4 Milestone/Tahapan Kegiatan	19
II.5 Analisa Stakeholder	22
II.6 Analisa Peran Dan Pengaruh Stakeholder	23
II.7 Identifikasi Stakeholder	25
II.8 Net Map	26
II.9 Strategi Komunikasi	26
II.10 Rencana Anggaran	26
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	27
III.1 Capaian Proyek Perubahan	27
III.2 Kendala Yang Dihadapi	38

III.3 Strategi Mengatasi Kendala	39
III.4 Pengalaman Memimpin Proyek	39
BAB IV PENUTUP	43
IV.1 Kesimpulan	43
IV.2 Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Jumlah Personil Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri	2
Tabel I.2 : Jumlah Kapal Patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri	2
Tabel II.1 : Tim Efektif	14
Tabel II.2 : Struktur Organisasi Proyek Perubahan	15
Tabel II.3. : <i>Milestone</i> Jangka Pendek	19
Tabel II.4. : <i>Milestone</i> Jangka Menengah	20
Tabel II.5. : <i>Milestone</i> Jangka Panjang	21
Tabel II.6. : Analisa <i>stakeholder</i> internal	22
Tabel II.7. : Analisa <i>stakeholder</i> eksternal	22
Tabel II.8. : Analisa Peran dan Pengaruh <i>stakeholder</i>	23
Tabel II.9. : Identifikasi <i>stakeholder</i> internal	25
Tabel II.10. : Identifikasi <i>stakeholder</i> eksternal	25
Tabel II.11. : <i>Net Map</i>	26
Tabel III.1. : Capaian Proyek Perubahan Tahap I	30
Tabel III.2. : Capaian Proyek Perubahan Tahap II	33
Tabel III.3. : Capaian Proyek Perubahan Tahap III	35
Tabel III.4. : Capaian Proyek Perubahan Tahap IV	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perintah Tim Efektif	46
Lampiran 2 : Surat Permohonan Narasumber	49
Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Narasumber	50
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Dukungan	51
Lampiran 5 : Surat Telegram Permohonan Anggaran Proyek Perubahan	52
Lampiran 6 : Perjanjian Kerja Teknis	53
Lampiran 7 : Daftar Hadir Proyek Perubahan	56
Lampiran 8 : Notula Proyek Perubahan	57
Lampiran 9 : Marketing Publik Proyek Perubahan - Bataminfo.co.id	58
Lampiran 10 : Marketing Publik Proyek Perubahan - Kriminalitas.co.id	59
Lampiran 11 : Komitmen Melanjutkan Proyek Perubahan	60
Lampiran 12 : Formulir Keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan	61
Lampiran 13 : Formulir Dialog Tim Efektif dan <i>Stakeholders</i>	62
Lampiran 14 : Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Efektif	63
Lampiran 15 : Dokumentasi Sosialisasi Proyek Perubahan Kepada Peserta.....	64
Lampiran 16 : Dokumentasi Sosialisasi Proyek Perubahan Kepada Bea Cukai	65
Lampiran 17 : Dokumentasi Pembinaan Aspek Teori	66
Lampiran 18 : Dokumentasi Pembinaan Aspek Praktek I	67
Lampiran 19 : Dokumentasi Pembinaan Aspek Praktek II	68

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan luas perairan yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi, wilayah laut Indonesia lebih dominan dibandingkan dengan wilayah darat yang hanya mencakup 1,9 juta kilometer persegi. Rasio laut terhadap darat yang begitu besar menunjukkan bahwa wilayah perairan memainkan peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditpolair bertanggung jawab kepada Korpolairud Baharkam Polri, di mana Subdit Patroli Air (Subdit Patroliair) bertindak sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan patroli di wilayah perairan. Subdit ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memastikan kelancaran aktivitas perdagangan, serta menindak pelanggaran hukum yang terjadi, seperti penyelundupan barang ilegal dan pencurian sumber daya alam. Tantangan yang dihadapi Subdit Patroliair semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas kriminal di perairan. Banyak di antara tindak kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran kepabeanan, yang sering kali sulit diidentifikasi dan ditangani karena keterbatasan pengetahuan personil kapal patroli mengenai regulasi dan prosedur yang terkait.

Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, dalam menjalankan tugasnya memiliki personil dan alat berupa kapal patroli, dengan data jumlah personil dan kapal sebagai berikut :

No.	PERSONEL	JUMLAH	KETERANGAN
1	DITPOLAIR	1445	POLRI : 1438 PNS : 7

Tabel 1.1 : Jumlah Personil Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri

KAPAL PATROLI		
NO	KELAS	JUMLAH
1	KAPAL KLAS A 2	5 KAPAL
2	KAPAL KLAS A 3	13 KAPAL
3	KAPAL KLAS B 1	2 KAPAL
4	KAPAL KLAS B 2	17 KAPAL
5	KAPAL KLAS B 3	6 KAPAL
6	KAPAL KLAS C 1	17 KAPAL
7	KAPAL KLAS C 2	5 KAPAL
8	KAPAL KLAS C 3	1 KAPAL
JUMLAH		66 KAPAL

Tabel 1.2 : Jumlah Kapal Patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri

Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan, perikanan ilegal, dan pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di laut. Namun,

luasnya wilayah laut dan kompleksitas ancaman yang dihadapi memerlukan peningkatan keahlian dan kapasitas personil Ditpolair.

Kepabeanan merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang melalui laut. Bea Cukai, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi arus barang ekspor-impor, memiliki peran sentral dalam mengatur lalu lintas barang di perairan serta menegakkan hukum terkait pelanggaran yang terjadi. Proses kepabeanan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia mematuhi aturan yang berlaku, dan segala bentuk pelanggaran seperti penyelundupan barang ilegal, manipulasi dokumen, serta pelanggaran aturan bea masuk dapat dicegah. Namun, perairan yang luas dan minimnya kontrol di beberapa titik membuat aktivitas penyelundupan melalui laut tetap menjadi masalah serius.

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan personil kapal patroli Ditpolair adalah melalui kerja sama dengan instansi Bea Cukai. Bea Cukai memiliki peran penting dalam mengawasi lalu lintas barang di perairan dan menegakkan hukum terkait perdagangan dan peraturan impor-ekspor. Kolaborasi ini sangat relevan mengingat banyaknya ancaman penyelundupan di perairan Indonesia, yang tidak hanya melibatkan barang-barang ilegal, tetapi juga komoditas berbahaya seperti narkoba. Melalui kerja sama dengan Bea Cukai, personil Ditpolair dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi perdagangan internasional, teknik pemeriksaan kapal, serta penegakan hukum di laut yang berhubungan dengan tindak penyelundupan. Selain itu, Bea Cukai dapat memberikan pelatihan teknis yang lebih spesifik mengenai pengawasan dan pemeriksaan kapal, sehingga kemampuan patroli Ditpolair menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Personil Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, terutama Subdit Patroliair yang bertugas pada kapal patroli, sering kali berhadapan dengan aktivitas penyelundupan atau pelanggaran terkait aturan kepabeanan. Meski telah dilatih dalam berbagai aspek penegakan hukum di laut, mereka masih belum mendapatkan pembinaan yang spesifik mengenai aspek kepabeanan, baik dari segi teori maupun praktik. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan dan memengaruhi kemampuan personil dalam bekerja sama dengan instansi lain yang lebih berwenang, seperti Bea Cukai. Akibatnya, efektivitas patroli menjadi terbatas, dan proses penegakan hukum di perairan Indonesia kurang optimal dalam menangani pelanggaran yang terkait dengan kepabeanan.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang menantang dan ancaman keamanan di perairan yang semakin meningkat, kerja sama yang kuat antara Ditpolair dan instansi lain seperti Bea Cukai menjadi sangat penting. Program pembinaan yang melibatkan instansi-instansi terkait akan memperkuat kompetensi personil kapal patroli Ditpolair, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum di laut yang semakin kompleks. Melalui sinergi ini, personil Ditpolair dapat lebih memahami peraturan hukum laut, mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengawasan perairan, serta mampu menangani berbagai situasi operasional di lapangan dengan lebih efektif. Pada akhirnya, strategi penguatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli perairan, memperkuat penegakan hukum di laut, serta menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia dari berbagai ancaman lintas batas.

I.2. Tujuan

- a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota Polair dalam bidang kepabeanan**

Dengan adanya proyek perubahan ini akan memastikan bahwa personil Polair memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum di kepabeanaan, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di wilayah perairan. Dengan pengetahuan yang diperbarui, anggota Polair akan lebih siap dalam menegakkan hukum terkait kejahatan maritim, seperti penyelundupan dan pelanggaran ekspor-impor barang. Pembinaan ini penting agar Polair dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan regulasi hukum internasional maupun nasional yang berlaku di perairan.

b. Menyediakan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional Polair

Tujuan ini menekankan pentingnya program pembinaan yang relevan dengan tantangan operasional di lapangan. Pembinaan yang dirancang secara spesifik akan membantu personil kapal patroli Polair mengatasi berbagai skenario di perairan yang memerlukan keterampilan teknis dan pengetahuan hukum. Kebutuhan operasional seperti patroli rutin, penegakan hukum di laut, dan respon cepat terhadap kejahatan perairan akan ditunjang dengan pembinaan yang terarah dan sesuai, sehingga personil dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

c. Mengembangkan kemampuan manajerial dan teknis anggota Polair

Pengembangan kemampuan manajerial dan teknis bertujuan agar anggota Polair tidak hanya mampu menjalankan tugas sehari-hari dengan efisien, tetapi juga mampu mengambil peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan manajemen yang kuat, setiap operasi di perairan akan lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga

hasil yang dicapai lebih optimal. Peningkatan keterampilan teknis memungkinkan mereka menangani berbagai situasi operasional dengan lebih cepat, efektif, dan sesuai prosedur.

d. Meningkatkan hubungan kerja sama antar instansi dalam berbagi ilmu yang dimiliki

Kerjasama antar instansi lain sangat penting dalam berbagi keahlian dan pengetahuan khusus. Tujuan ini adalah untuk memperkuat sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga setiap instansi dapat saling melengkapi dalam menjalankan tugas patroli dan pengamanan perairan. Dengan berbagi informasi dan praktik terbaik, anggota Polair akan memperoleh wawasan tambahan yang dapat meningkatkan profesionalisme mereka, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

I.3. Manfaat

a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan Personil

Program ini berfokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis personil kapal patroli dalam menangani berbagai tindak pidana di laut, seperti penyelundupan dan perikanan ilegal. Dengan pembekalan yang lebih mendalam terkait hukum laut dan keterampilan teknis, personil akan lebih siap dalam menghadapi situasi kompleks di lapangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja lebih profesional dan efektif dalam menjalankan patroli, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam merespons ancaman keamanan maritim yang semakin berkembang. Kompetensi yang lebih baik juga memastikan

penegakan hukum di laut berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

b. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Perairan

Dengan peningkatan kemampuan personil, efektivitas dalam pelaksanaan tugas patroli di perairan Indonesia akan meningkat. Personil yang terlatih dengan baik akan lebih cakap dalam memantau, mengidentifikasi, dan menangani pelanggaran hukum di laut, sehingga tugas patroli menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Patroli yang dilaksanakan secara profesional akan memberikan dampak positif bagi keamanan wilayah laut Indonesia, terutama dalam hal pencegahan tindak pidana seperti penyelundupan barang ilegal. Efektivitas ini juga mengarah pada peningkatan kepastian hukum dan penurunan tingkat kriminalitas di wilayah perairan.

c. Terbangunnya Sinergi yang Baik antara Polair dengan Instansi Bea Cukai

Kerja sama yang lebih intensif antara Polair dan Bea Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan di laut akan memperkuat sinergi antar instansi. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan pelatihan bersama, sehingga setiap pihak dapat saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Polair dapat memanfaatkan keahlian Bea Cukai dalam bidang kepabeanan, sementara Bea Cukai dapat mengandalkan Polair dalam hal penegakan hukum di laut. Dengan demikian, tugas patroli perairan dapat dilakukan lebih efisien, meningkatkan ketertiban di wilayah perairan, dan mengurangi potensi pelanggaran hukum di laut.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek perubahan ini dibatasi pada personil kapal patroli Yudistira-8003 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

I.5. Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan

Keberhasilan proyek perubahan ini akan diukur dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan personil kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam menangani tindak pidana di laut. Indikator keberhasilan mencakup beberapa aspek kunci: pertama, hasil evaluasi pembinaan yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Evaluasi ini akan meliputi penilaian melalui tes, simulasi, dan observasi langsung terhadap performa personil dalam situasi nyata. Kedua, kemampuan personil dalam melaksanakan tugas patroli, yang akan dinilai berdasarkan efisiensi, ketepatan, dan efektivitas dalam mengidentifikasi dan menangani kasus tindak pidana di laut. Ketiga, efektivitas penegakan hukum di perairan yang dapat diukur dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, pengurangan pelanggaran, serta umpan balik dari masyarakat dan instansi Bea Cukai. Melalui indikator-indikator ini, keberhasilan proyek perubahan akan tercermin dalam peningkatan kualitas dan hasil kinerja personil, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan.

BAB II

PERENCANAAN PROYEK PERUBAHAN

II.1. Deskripsi Pelaksanaan Proyek Perubahan

A. Kondisi saat ini

Saat ini, personil kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menangani tindak pidana kepabeanan di perairan. Meski Ditpolair memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan laut Indonesia, tantangan di lapangan sering kali terkait dengan aspek hukum yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi kepabeanan. Tindak pidana seperti penyelundupan barang ilegal dan pelanggaran aturan ekspor-impor membutuhkan investigasi dan penindakan khusus yang menjadi keahlian utama Bea Cukai. Akibatnya, Ditpolair sering bergantung pada instansi Bea Cukai dalam operasi kepabeanan, yang bisa menghambat efektivitas patroli di laut.

Personil kapal patroli, khususnya KP. Yudistira-8003, sering kali menghadapi pelanggaran kepabeanan di mana barang-barang ilegal diselundupkan melalui perairan. Namun, dengan keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai aturan kepabeanan, kemampuan personil dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran tersebut masih kurang. Ketidakmampuan ini membuat operasi patroli tidak optimal, dan Ditpolair kurang mandiri dalam menghadapi pelanggaran kepabeanan, sehingga kehadiran Bea Cukai menjadi sangat penting dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.

Selain itu, kendala ini mempengaruhi efektivitas patroli dalam mencegah pelanggaran, baik dalam hal penyelundupan barang ilegal

maupun pelanggaran lain yang memerlukan intervensi cepat di perairan. Tanpa keterampilan yang memadai dalam menangani aspek teknis dan hukum kepabeanan, personil patroli sering kali hanya dapat melakukan tindakan awal sementara menunggu kehadiran Bea Cukai. Kondisi ini mengakibatkan respon yang lebih lambat terhadap ancaman yang ada, dan peluang pelanggaran yang dapat tertangani menjadi berkurang.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman personil Ditpolair mengenai regulasi kepabeanan juga mengurangi kemampuan mereka untuk berkoordinasi secara optimal dengan Bea Cukai dan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan perairan. Dengan demikian, banyak situasi yang memerlukan koordinasi antar-lembaga dalam penanganan tindak pidana kepabeanan tidak dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Keterbatasan ini menambah tantangan dalam penegakan hukum di perairan, yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi penyelundupan yang semakin canggih.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas personil Ditpolair, khususnya KP. Yudistira-8003, dalam memahami dan menerapkan regulasi kepabeanan. Pembinaan khusus yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan hukum di bidang ini akan membantu personil menjadi lebih mandiri dalam operasi di perairan. Pembinaan ini akan mencakup pemahaman menyeluruh tentang peraturan kepabeanan, teknik pemeriksaan barang dan kapal, serta langkah-langkah penegakan hukum yang relevan dalam menangani kasus-kasus penyelundupan. Dengan keterampilan ini, diharapkan personil Ditpolair dapat lebih efisien dalam melaksanakan tugas mereka tanpa harus bergantung pada Bea Cukai dalam setiap operasi.

Selain itu, peningkatan kompetensi ini juga akan memperkuat kemampuan personil dalam berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, sehingga mempercepat respon terhadap pelanggaran yang

terjadi di laut. Dengan adanya pembinaan yang lebih terfokus, Ditpolair diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di perairan Indonesia, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani pelanggaran kepabeanan secara lebih mandiri dan profesional.

B. Kondisi yang diharapkan

Dalam kondisi yang diharapkan, personil kapal patroli Ditpolair Korpolarud Baharkam Polri, khususnya KP. Yudistira-8003, akan menjadi tenaga profesional yang memiliki kemampuan komprehensif dalam penanganan tindak pidana kepabeanan di perairan Indonesia. Proses pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan khusus bersama instansi Bea Cukai akan membekali personil dengan pemahaman mendalam terkait regulasi kepabeanan, prosedur ekspor-impor, dan langkah-langkah hukum dalam menghadapi penyelundupan barang ilegal. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah memastikan personil Ditpolair mampu beroperasi secara mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada Bea Cukai dalam setiap operasi yang melibatkan pelanggaran kepabeanan.

Keahlian yang diharapkan dari personil ini mencakup keterampilan teknis untuk memeriksa kapal, mengidentifikasi barang ilegal, dan mengaplikasikan langkah-langkah hukum sesuai standar nasional dan internasional. Dengan penguasaan keterampilan ini, personil KP. Yudistira-8003 akan lebih siap menghadapi berbagai jenis kejahatan di perairan, khususnya dalam penanganan pelanggaran kepabeanan, dan dapat bertindak cepat serta tepat tanpa harus menunggu kehadiran instansi lain. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli perairan dan mempercepat respons terhadap pelanggaran hukum di laut, sehingga operasi dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan standar penegakan hukum yang berlaku.

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya bertujuan untuk melatih personil dalam aspek teknis dan operasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sinergi dan kerja sama antar-instansi. Pembinaan yang lebih mendalam terkait penanganan kasus kepabeanan juga akan meningkatkan kemampuan personil dalam berkoordinasi dengan Bea Cukai dan instansi lainnya. Hal ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan efisien, di mana respon terhadap tindak pidana di perairan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, mengurangi potensi kerugian bagi negara akibat pelanggaran di bidang ekspor-impor.

Selain dari aspek teknis, peningkatan kompetensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan rasa percaya diri personil KP. Yudistira-8003 dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan lebih mampu dalam melakukan pengambilan keputusan secara mandiri di lapangan, mengidentifikasi potensi risiko, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan pembinaan yang baik, personil Ditpolair juga akan lebih memahami peran mereka sebagai penjaga kedaulatan laut Indonesia dan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang lebih luas.

Efek domino dari kondisi yang diharapkan ini juga mencakup peningkatan keseluruhan operasi Ditpolair di perairan. Dengan personil yang lebih terampil dan profesional, operasi patroli akan berjalan lebih lancar dan efektif. Hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya ketergantungan pada Bea Cukai untuk operasi-operasi yang bersifat reguler, sehingga Bea Cukai dapat lebih fokus pada operasi yang lebih kompleks. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap Ditpolair sebagai instansi yang mampu menangani pelanggaran kepabeanan juga akan meningkat, mengingat kemampuan personil dalam melakukan operasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kondisi yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah terbentuknya personil kapal patroli Ditpolair yang lebih kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan kepabeanan di perairan. Peningkatan keterampilan teknis, sinergi antar-instansi, serta penguasaan regulasi hukum kepabeanan akan menciptakan sistem patroli perairan yang lebih efisien dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di laut.

II.2. Output Proyek Perubahan

A. Internal

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan personil Kapal Patroli Yudistira - 8003 dalam ilmu kepabeanan yang lebih profesional dan terampil akan menjadi salah satu output utama proyek perubahan ini. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur kepabeanan, keterampilan operasional dalam situasi patroli, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Melalui pelatihan dan pembinaan yang intensif, personil akan lebih siap menghadapi tantangan dan menangani kasus tindak pidana di laut dengan lebih efisien. Hasil dari peningkatan ini diharapkan dapat terlihat dalam performa patroli yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih efektif, dan penurunan jumlah pelanggaran di perairan. Peningkatan keterampilan ini akan mencerminkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dan kompetensi yang lebih baik di lapangan.

B. Eksternal

Terciptanya sinergi yang lebih baik antara Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dengan instansi Bea Cukai merupakan output eksternal yang penting dari proyek perubahan ini. Sinergi ini diharapkan dapat

meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum di perairan, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran yang melibatkan aspek kepabeanan. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, proses komunikasi dan koordinasi akan menjadi lebih efektif, sehingga mempercepat respon dan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Sinergi yang lebih baik juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan tukar informasi, dan memperkuat strategi penegakan hukum bersama. Hal ini akan berkontribusi pada pengelolaan perairan yang lebih aman dan teratur, serta meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kedua instansi.

II.3. Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata kelola proyek merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol suatu program kegiatan yang akan ditempuh agar memenuhi target dengan kriteria keberhasilan yang sudah dicanangkan. Adapun tahapan dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

A. Pembentukan tim efektif

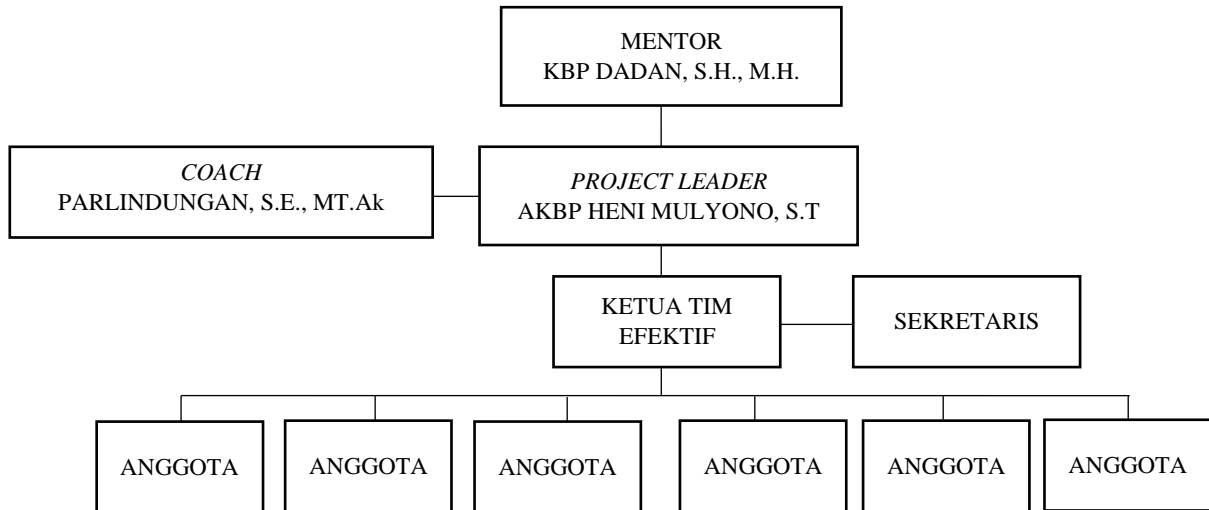
Dalam pelaksanaan proyek perubahan diperlukan perencanaan awal untuk menentukan SDM yang akan terlibat dalam proyek tersebut beserta penyusunan tugas dan tanggung jawab, maka dari itu dibentuklah Tim Efektif sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap proyek perubahan yang akan dijalankan. Adapun daftar Tim Efektif sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
1.	HENI MULYONO, S.T	AKBP/ 71050435	DAN KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	<i>PROJECT LEADER</i>
2.	JUNAIDI, S. ST.	KOMPOL/ 75070213	KKM KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	KETUA TIM EFEKTIF
3.	ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr.Pel	IPTU/ 96061330	PS. PANAT I KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	SEKRETARIS
4.	BOWO KURNIAWAN, S.H	IPDA/ 81020539	PS. PATEK 1 KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
5.	UUS RONI HENDRATA	AIPDA/ 83091036	PS. PANAT II KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
6.	ENDA SUTISNA	AIPDA/ 85090120	PS. PAKOMLEK KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
7.	VINSENSIUS LIBERIUS W, S.H	BRIPKA/ 90040211	PS. PANAT III KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
8.	DADANG HERMAWAN	BRIPKA/ 80050384	PS. PATEK II KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
9.	DIMAS TEGAR SUGIARTA	BRIPDA/ 04010117	BANAT KP. YUDISTIRA-8003 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA

Tabel II.1 : Tim Efektif

B. Struktur Organisasi Proyek Perubahan

Struktur Organisasi adalah suatu bentuk hierarki dalam menjalankan proyek perubahan. Dengan adanya Struktur Organisasi ini diharapkan setiap pihak yang terlibat memahami hierarki organisasi dan melaksanakan tugas sesuai dengan struktur yang telah dibuat. Adapun Struktur Organisasi Proyek Perubahan sebagai berikut :



Tabel II.2 : Struktur Organisasi Proyek Perubahan

C. Deskripsi Tata Kelola Proyek Perubahan

1. Mentor :

Mentor adalah pembimbing langsung *project leader* pada saat melakukan tahap membangun komitmen bersama dan tahap laboratorium kepemimpinan. Adapun Tugas seorang mentor adalah sebagai berikut:

- a. Memberi otoritas kepada *project leader* untuk menyusun rencana proyek perubahan;
- b. Mempelajari dan mendalami rencana proyek perubahan *project leader*;

- c. Memberi masukan penyempurnaan terhadap rencana proyek perubahan *project leader*;
- d. Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
- e. Menjadi sumber inspirasi bagi *project leader* dalam membuat rencana proyek perubahan;
- f. Memonitor progres pelaksanaan proyek perubahan;
- g. Melakukan intervensi bila *project leader* mengalami kendala;
- h. Menyetujui rencana proyek perubahan;
- i. Menghadiri seminar rancangan proyek perubahan.

2. *Coach* :

Coach adalah sosok pembimbing *project leader* atau peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Adapun tugas seorang *coach* adalah :

- a. Membimbing *project leader* dalam menyelesaikan proyek perubahan;
- b. Memberi koreksi atau perbaikan kepada *project leader* terkait proyek perubahan yang dilaksanakan;
- c. Memberi saran atau masukan kepada *project leader* terkait proyek perubahan yang dilaksanakan;
- d. Memastikan proyek perubahan yang dibuat tidak menjauh dari rancangan proyek perubahan beserta ruang lingkupnya;
- e. Menyetujui naskah proyek perubahan.

3. *Project Leader* :

Project Leader adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional T.K. II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang bertanggungjawab dalam pembuatan rancangan proyek perubahan

serta menjalankan proyek perubahan. Adapun tugas *project leader* sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek perubahan;
- b. Koordinator umum tim efektif;
- c. Mempersiapkan dan merancang seluruh rencana kegiatan proyek perubahan;
- d. Melaporkan dan mendiskusikan hasil rancangan proyek perubahan dengan mentor dan *coach*;
- e. Menggalang komunikasi dengan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek perubahan;
- f. Menyusun laporan setiap tahapan kepada mentor, *coach*, LAN dan Pimpinan instansi;
- g. Berkoordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal.

4. Ketua Tim Efektif

Ketua Tim Efektif adalah ketua pelaksana dalam menjalankan proyek perubahan yang dipilih langsung oleh *project leader* untuk mendukung proyek perubahan. Adapun tugas Ketua Tim Efektif sebagai berikut :

- a. Menjalankan proyek perubahan sesuai arahan *project leader*;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan proyek perubahan kepada *project leader*;
- c. Memimpin anggota proyek perubahan dalam pelaksanaan proyek perubahan;
- d. Mengawasi jalannya proyek perubahan;

5. Sekretaris

Sekretaris adalah perantara antara *project leader* dan *stakeholder* sekaligus antara Ketua Tim Efektif dan anggota, serta

sebagai notulen dalam pembuatan rancangan dan naskah proyek perubahan. Adapun tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan surat menyurat (korespondensi);
- b. Mengatur koordinasi antara *project leader* dengan *stakeholder* internal dan eksternal dalam menjalankan proyek perubahan;
- c. Bertindak sebagai perantara antara *Project Leader* dengan Anggota;
- d. Mengatur rapat, pertemuan internal maupun eksternal;
- e. Membuat rancangan proyek perubahan sesuai arahan *project leader*;
- f. Membuat naskah proyek perubahan sesuai arahan *project leader*.

6. Anggota

Anggota adalah pelaksana proyek perubahan yang bertindak sesuai arahan Ketua Tim Efektif melalui Sekretaris. Adapun tugas Anggota sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proyek perubahan sesuai arahan Ketua Tim Efektif dan Sekretaris;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan proyek perubahan;

II.4. Milestone/Tahapan Kegiatan

A. Jangka Pendek

No	Uraian Kegiatan	Durasi Kegiatan	Penanggung Jawab	Output
1.	Rapat konsolidasi pelaksanaan proyek perubahan	Bulan 1	Pimpinan Proyek	Tersusun tim efektif dan administrasi pendukung proyek perubahan
2.	Berkoordinasi dengan instansi Bea Cukai	Bulan 1	Pimpinan Proyek	Kesepakatan kerja sama dengan instansi Bea Cukai
3.	Melaksanakan kolaborasi proyek perubahan di KP. Yudistira-8003	Bulan 2	Pimpinan Proyek	Pelaksanaan pembinaan bersama dengan instansi Bea Cukai di KP. Yudistira-8003
4.	Pengawasan program pembinaan	Bulan 2	Pimpinan Proyek	Kegiatan pembinaan berjalan dengan baik dan kondusif
5.	Analisa dan evaluasi proyek perubahan jangka pendek	Bulan 2	Pimpinan Proyek	Laporan hasil anev

Tabel II.3. : Milestone Jangka Pendek

B. Jangka Menengah

No	Uraian Kegiatan	Durasi Kegiatan	Penanggung Jawab	Output
1.	Rapat konsolidasi pelaksanaan proyek perubahan	Bulan 3	Pimpinan Proyek	Tersusun tim dan administrasi pendukung proyek perubahan
2.	Berkoordinasi dengan instansi Bea Cukai	Bulan 3	Pimpinan Proyek	Kesepakatan kerja sama dengan instansi Bea Cukai
3.	Melaksanakan kolaborasi proyek perubahan di Kapal Polisi Kelas A2	Bulan 4	Pimpinan Proyek	Pelaksanaan pembinaan bersama dengan instansi Bea Cukai di Kapal Polisi Kelas A2
4.	Pengawasan program pembinaan	Bulan 4	Pimpinan Proyek	Kegiatan pembinaan berjalan dengan baik dan kondusif
5.	Analisa dan evaluasi proyek perubahan jangka menengah	Bulan 4	Pimpinan Proyek	Laporan hasil anev

Tabel II.4. : *Milestone* Jangka Menengah

C. Jangka Panjang

No	Uraian Kegiatan	Durasi Kegiatan	Penanggung Jawab	Output
1.	Rapat konsolidasi pelaksanaan proyek perubahan	Bulan 5	Pimpinan Proyek	Tersusun tim dan administrasi pendukung proyek perubahan
2.	Berkoordinasi dengan instansi Bea Cukai	Bulan 5	Pimpinan Proyek	Kesepakatan kerja sama dengan instansi Bea Cukai
3.	Melaksanakan kolaborasi proyek perubahan pada seluruh Kapal Polisi	Bulan 6	Pimpinan Proyek	Pelaksanaan pembinaan bersama dengan instansi Bea Cukai pada seluruh Kapal Polisi
4.	Pengawasan program pembinaan	Bulan 6	Pimpinan Proyek	Kegiatan pembinaan berjalan dengan baik dan kondusif
5.	Analisa dan evaluasi proyek perubahan jangka panjang	Bulan 6	Pimpinan Proyek	Laporan hasil anev

Tabel II.5. : *Milestone* Jangka Panjang

II.5. Analisa Stakeholder

A. Stakeholder Internal

No.	Stakeholder	Peran	Pengaruh/Fungsi	Tindakan
1.	Kakorpolairud	Pembuat kebijakan instansi Korpolairud	Menerapkan dan mengawasi kebijakan	Membangun komunikasi yang efektif
2.	Dirpolair	Pembuat kebijakan instansi Ditpolair	Menerapkan dan mengawasi kebijakan	Membangun komunikasi yang efektif
3.	Kabag Renmin	Pembuat rencana dan administrasi instansi Ditpolair	Penanggung jawab fungsi perencanaan dan administrasi	Membangun komunikasi yang efektif
4.	Kasubdit Patroliair	Mentor dalam proyek perubahan	Penanggung jawab fungsi patroli, pengawalan, penolong dan penyelamat	Membangun komunikasi yang efektif
5.	Tim Efektif	Pendukung proyek perubahan	Pendukung dan pelaksana proyek perubahan	Membangun komunikasi yang efektif
6.	Personil KP. Yudistira-8003	Peserta proyek perubahan	Peserta dan pendukung kegiatan proyek perubahan	Membangun komunikasi yang efektif

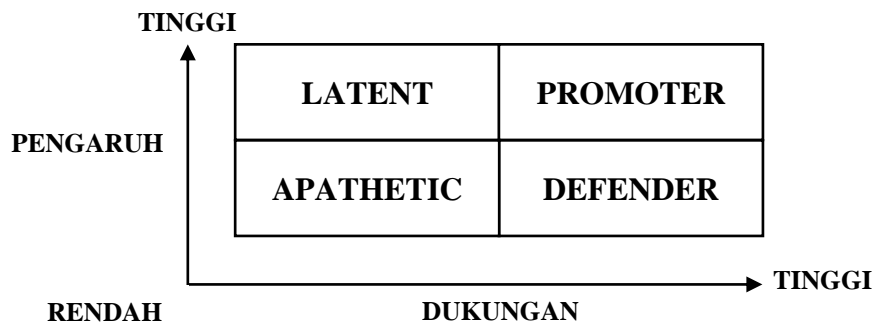
Tabel II.6. : Analisa stakeholder internal

B. Stakeholder Eksternal

No.	Stakeholder	Peran	Pengaruh/Fungsi	Tindakan
1.	Bea dan Cukai Maluku	Menyediakan narasumber	Otoritas kepabeanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara	Membangun komunikasi yang efektif
2.	Platform Surat Kabar Digital	Mempublikasi Kegiatan Proyek Perubahan	Membuat dan mempublikasi berita pada laman surat kabar digital	Membangun komunikasi yang efektif

Tabel II.7. : Analisa stakeholder eksternal

II.6. Analisa Peran Dan Pengaruh *Stakeholder*



Tabel II.8. Analisa dan Pengaruh *Stakeholder*

A. Promoters

Promoters adalah kelompok yang sangat mendukung dan berkomitmen terhadap sebuah ide, proyek, atau organisasi. Mereka memiliki tingkat kepedulian dan keterlibatan tinggi, sehingga berperan aktif dalam menyebarkan informasi serta mengajak orang lain untuk terlibat. Promoters umumnya memiliki loyalitas yang kuat dan cenderung memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya, memotivasi anggota tim lain, dan mempertahankan tujuan atau visi organisasi. Mereka sering kali menjadi aset penting dalam implementasi perubahan atau inisiatif baru karena dapat membantu mempercepat pencapaian target dan memobilisasi dukungan internal maupun eksternal.

B. Latents

Latents adalah individu atau kelompok dengan potensi dukungan tinggi tetapi belum termotivasi atau aktif dalam berkontribusi. Mereka mungkin memiliki pandangan positif atau sejalan dengan ide atau proyek yang diperkenalkan, tetapi mereka belum mengambil tindakan atau sikap yang mendukung secara langsung. Latents dapat diaktifkan dengan

pendekatan atau motivasi yang tepat, misalnya melalui sosialisasi atau pemberian insentif yang relevan. Potensi dukungan dari kelompok Latents sering kali menjadi target bagi pemimpin proyek atau manajer perubahan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan memperluas basis dukungan.

C. Apathetics

Apathetics adalah kelompok yang memiliki tingkat keterlibatan dan kepedulian yang rendah terhadap proyek, ide, atau organisasi tertentu. Mereka cenderung bersikap pasif dan tidak menunjukkan minat atau perhatian, baik secara positif maupun negatif. Apathetics tidak terpengaruh oleh keberhasilan atau kegagalan proyek dan sering kali tidak terlibat dalam proses yang sedang berlangsung. Ketidaktertarikan mereka dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman, relevansi yang rendah dengan kepentingan mereka, atau ketiadaan insentif untuk ikut berpartisipasi. Akibatnya, Apathetics tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan atau keberhasilan suatu inisiatif.

D. Defenders

Defenders adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan dan loyalitas tinggi, tetapi fokus mereka lebih netral atau tradisi yang ada daripada mendukung perubahan baru. Mereka cenderung skeptis atau bahkan kritis terhadap inisiatif atau ide yang dianggap mengganggu atau merubah struktur yang sudah mapan. Defenders biasanya memegang nilai-nilai tradisional dan akan berusaha mengarahkan tim atau organisasi untuk tetap mengikuti aturan atau cara lama. Meskipun perannya mungkin memperlambat perubahan, Defenders juga berguna dalam menjaga stabilitas dan menghindari risiko yang tidak perlu.

II.7. Identifikasi *Stakeholder*

A. *Stakeholder* Internal

No.	<i>Stakeholder</i>	Strategi Komunikasi	Dukungan	Pengaruh	Analisa <i>Stakeholder</i>
1.	Kakorpolairud	Kebijakan Keputusan Konsultasi	Tinggi	Tinggi	Promoter
2.	Dirpolair	Konsultasi Bimbingan	Tinggi	Tinggi	Promoter
3.	Kabag Renmin	Konsultasi Bimbingan	Tinggi	Tinggi	Promoter
4.	Kasubdit Patroliair	Konsultasi Bimbingan	Tinggi	Tinggi	Promoter
5.	Tim Efektif	Komunikasi Instruksi	Tinggi	Tinggi	Promoter
6.	Personil KP. Yudistira- 8003	Komunikasi Instruksi	Tinggi	Tinggi	Promoter

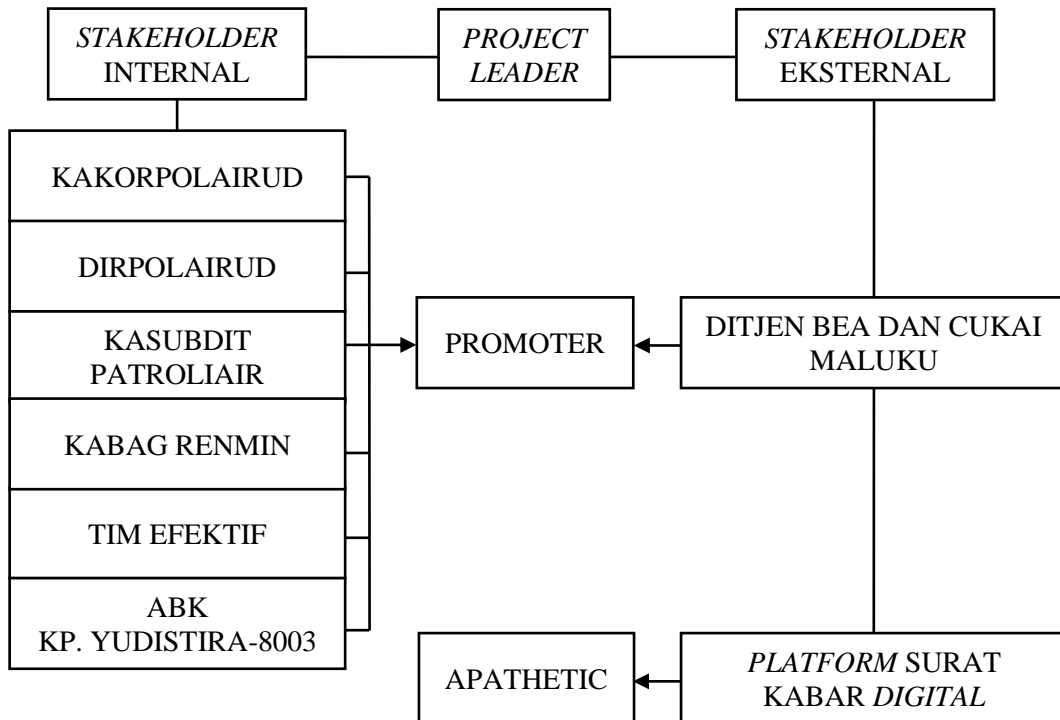
Tabel II.9. : Identifikasi *stakeholder* internal.

B. *Stakeholder* Eksternal

No.	<i>Stakeholder</i>	Strategi Komunikasi	Dukungan	Pengaruh	Analisa <i>Stakeholder</i>
1.	Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Komunikasi Koordinasi	Tinggi	Tinggi	Promoter
2.	<i>Platform</i> Surat Kabar <i>Digital</i>	Komunikasi Koordinasi	Rendah	Rendah	Apathetic

Tabel II.10. : Identifikasi *stakeholder* eksternal.

II.8. Net Map



Tabel II.11. : Net Map

II.9. Strategi Komunikasi

Dalam pelaksanaan proyek perubahan tentu akan melibatkan berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal yang pastinya memerlukan strategi komunikasi yang berbeda beda sesuai dengan tingkat kewenangan dan juga hierarki, sehingga komunikasi yang dilakukan akan menjadi efektif. Strategi komunikasi ini agar dapat diketahui klasifikasi stakeholder yang dalam posisi promotor, defender, latents, dan apathetic.

II. 10. Rencana Anggaran

Anggaran digunakan pada saat pelaksanaan proyek perubahan jangka Panjang, dengan menggunakan anggaran DIPA Korpolaairud T.A. 2025.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

III.1. Capaian Proyek Perubahan

Dalam pelaksanaan proyek perubahan terdapat hasil yang dicapai selama proses proyek perubahan berlangsung. Hasil tersebut berhasil meningkatkan kapasitas dan efektivitas personil Ditpolair, khususnya KP. Yudistira-8003, dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut. Melalui kolaborasi dengan Bea Cukai Maluku, personil mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang mencakup aspek teori dan praktik terkait hukum kepabeanan. Pelatihan ini memfokuskan pada peningkatan pemahaman regulasi, pemeriksaan barang, serta metode identifikasi pelanggaran kepabeanan, yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam operasi di laut. Hasilnya, personil kini lebih siap dan responsif dalam menghadapi ancaman penyelundupan dan pelanggaran bea masuk di wilayah perairan Indonesia.

Dari segi kolaborasi antar-institusi, proyek ini berhasil mempererat hubungan antara Ditpolair dan Bea Cukai, memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dalam penegakan hukum di laut. Sinergi ini membawa manfaat signifikan dalam proses identifikasi dan pengawasan aktivitas ekspor-impor, mengurangi potensi penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat pemahaman kedua pihak tentang peran masing-masing dalam melindungi kedaulatan ekonomi dan keamanan Indonesia.

Melalui pencapaian ini, Ditpolair tidak hanya meningkatkan kapasitas individu personil, tetapi juga memperkuat mekanisme kerja

bersama yang mendukung keberhasilan operasi di lapangan. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat dan kerja sama yang kuat, Ditpolair mampu menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum di perairan. Adapun tahapan dari pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

A. Tahap I - Mobilisasi Dukungan Internal:

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dari dalam organisasi, yaitu Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Mobilisasi dukungan internal melibatkan pendekatan kepada pimpinan, anggota, dan personil yang terlibat dalam patroli. Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan hasil yang diharapkan dari proyek perubahan agar semua pihak internal memahami dan mendukung pelaksanaan proyek. Dukungan internal sangat penting untuk memastikan komitmen dari setiap anggota dalam mencapai tujuan proyek.

B. Tahap II - Mobilisasi Dukungan Eksternal:

Pada tahap ini, proyek perubahan berfokus pada pengumpulan dukungan dari pihak eksternal, khususnya Bea Cukai Maluku sebagai mitra utama dalam proyek ini. Melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, proyek ini memperkuat kerja sama lintas instansi. Dukungan eksternal memungkinkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum kepabeanan di laut. Tahap ini juga melibatkan perjanjian kerja sama dan kesepakatan yang mengatur kolaborasi antar-institusi dalam mendukung keberhasilan proyek.

C. Tahap III - Forum Komunikasi dan Sosialisasi Proyek:

Tahap ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dalam tahap ini, dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap proyek, baik bagi personil Ditpolair maupun Bea Cukai. Forum ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi tantangan serta mencari solusi secara bersama. Diskusi dan dialog yang dibangun dalam forum ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai peran, tanggung jawab, dan prosedur dalam pelaksanaan proyek perubahan.

D. Tahap IV - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek Perubahan:

Tahap akhir ini berfokus pada pengendalian dan pengawasan implementasi proyek untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, penilaian hasil, dan evaluasi terhadap progres yang dicapai. Apabila terdapat hambatan atau penyimpangan, langkah korektif segera diambil untuk mengembalikan proyek pada jalur yang tepat. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas hasil proyek agar capaian yang diperoleh memenuhi standar yang diharapkan dan dapat berkelanjutan.

Hasil capaian kegiatan proyek perubahan yang telah dilaksanakan dari tahap I sampai dengan IV diuraikan pada tabel berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN		STAKEHOLDER	OUTPUT
				RENCANA	REALISASI		
TAHAP I MOBILISASI DUKUNGAN INTERNAL							
1.	Pembentukan dan Pengajuan Tim Efektif	Menentukan anggota tim efektif untuk mendukung proyek perubahan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan I	20 September 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif	Tim Efektif terbentuk
2.	Pembuatan Sprin Tim Efektif	Sebagai bentuk administrasi pendukung proyek perubahan	Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, DKI Jakarta	Bulan I	23 September 2024	1. Project Leader 2. Mentor	Sprin Tim Efektif

3.	Rapat koordinasi tim efektif	Komitmen Bersama serta pembagian tugas dan tanggung jawab tim efektif	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan I	23 September 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif	Dukungan tim efektif dan pembagian tugas dan dokumentasi
4.	Project Leader menghadap Coach	Meminta saran dan masukan dalam pelaksanaan proyek perubahan	Pusdikmin Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat	Bulan I	4 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Coach	Saran dan masukan Coach
5.	Project Leader menghadap Mentor	Meminta saran dan masukan dalam pelaksanaan	Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta	Bulan I	7 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Mentor	Saran dan masukan Mentor

		proyek perubahan	Utara, DKI Jakarta				
6.	Project Leader menghadap Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri	Meminta dukungan terhadap proyek perubahan	Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, DKI Jakarta	Bulan I	7 Oktober 2024	1. Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri 2. Project Leader	Video Dukungan Proyek Perubahan
7.	Project Leader menghadap Kakorpolairud Baharkam Polri	Meminta dukungan terhadap proyek perubahan	Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, DKI Jakarta	Bulan I	7 Oktober 2024	1. Kakorpolairud Baharkam Polri 2. Project Leader	Video Dukungan Proyek Perubahan

Tabel III.1 Capaian Proyek Perubahan Tahap I

NO	KEGIATAN	TUJUAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN		STAKEHOLDER	OUTPUT
				RENCANA	REALISASI		
TAHAP II MOBILISASI DUKUNGAN EKSTERNAL							
1.	Pembuatan surat permohonan narasumber	Sebagai bentuk administrasi pendukung proyek perubahan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan I	23 September 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif	Surat permohonan narasumber
2.	Memberikan surat permohonan narasumber	Sebagai bentuk administrasi dukungan proyek perubahan	Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Bulan I	23 September 2024	1. Tim Efektif 2. Staf Bea dan Cukai Maluku	Surat permohonan narasumber diserahkan
3.	Pembuatan surat pernyataan dukungan proyek perubahan	Sebagai bentuk administrasi pendukung proyek perubahan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan I	25 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif	Surat pernyataan dukungan proyek perubahan

4.	Penandatanganan surat pernyataan dukungan proyek perubahan	Sebagai bentuk administrasi dukungan proyek perubahan	Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Bulan I	25 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Kabid Penyidikan dan penindakan Bea dan Cukai Maluku 4. Staf Bea dan Cukai Maluku 	Dokumentasi
----	--	---	--	---------	-----------------	--	-------------

Tabel III.2 Capaian Proyek Perubahan Tahap II

NO	KEGIATAN	TUJUAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN		STAKEHOLDER	OUTPUT
				RENCANA	REALISASI		
TAHAP III FORUM KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN							
1.	Sosialisasi proyek perubahan kepada peserta proyek perubahan	Menjelaskan maksud dan tujuan proyek perubahan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan I	7 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Peserta proyek perubahan	Dokumentasi
2.	Sosialisasi proyek perubahan kepada instansi Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Menjelaskan maksud dan tujuan proyek perubahan	Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Bulan I	9 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Ditjen Bea & Cukai Maluku	Dokumentasi

Tabel III.3 Capaian Proyek Perubahan Tahap III

NO	KEGIATAN	TUJUAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN		STAKEHOLDER	OUTPUT
				RENCANA	REALISASI		
TAHAP IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN							
1.	Melaksanakan pembinaan anggota KP. Yudistira-8003 aspek teori dengan narasumber dari Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Meningkatkan pengetahuan anggota KP. Yudistira-8003 di bidang kepabeanan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan II	11 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Ditjen Bea & Cukai Maluku	1. Dokumentasi 2. Daftar hadir 3. Notula
2.	Melaksanakan pembinaan anggota KP. Yudistira-8003 aspek praktek dengan narasumber dari Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Meningkatkan kemampuan anggota KP. Yudistira-8003 di bidang kepabeanan	KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku	Bulan II	14 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Ditjen Bea & Cukai Maluku	Dokumentasi

3.	Melaksanakan pembinaan anggota KP. Yudistira-8003 aspek praktek dengan narasumber dari Ditjen Bea dan Cukai Maluku	Meningkatkan kemampuan anggota KP. Yudistira-8003 di bidang kepabeanan	Pelabuhan Peti Kemas Yos Sudarso, Ambon, Maluku	Bulan II	15 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Ditjen Bea & Cukai Maluku	Dokumentasi
4.	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek perubahan	Memastikan proyek perubahan berjalan dengan baik.	1. KP. Yudistira-8003, Ambon, Maluku 2. Pelabuhan Peti Kemas Yos Sudarso, Ambon, Maluku	Bulan II	11, 14, 15 Oktober 2024	1. Project Leader 2. Tim Efektif 3. Ditjen Bea & Cukai Maluku	Dokumentasi

Tabel III.4 Capaian Proyek Perubahan Tahap IV

III.2. Kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan proyek perubahan pada tahap awal sampai akhir terdapat beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

A. Kegiatan Praktik Tidak Sesuai Harapan

Rencana awal kegiatan praktik adalah melakukan pemeriksaan langsung pada kapal yang melakukan kegiatan ekspor-impor yang masuk ke wilayah Ambon, Maluku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata bagi personil dalam menangani kapal ekspor-impor sesuai prosedur kepabeanan, termasuk pengecekan dokumen, inspeksi barang, dan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah jarangya kapal ekspor-impor yang berlabuh di wilayah Ambon, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.

B. Beberapa Kegiatan Di tunda

Kegiatan pembinaan beberapa kali mengalami penundaan karena pada tanggal 3 Oktober 2024 terdapat kegiatan *Forum Group Discussion* Korpolarud Baharkam Polri yang melibatkan seluruh Komandan Kapal yang BKO, dalam hal ini Komandan KP. Yudistira-8003 selaku *Project Leader* harus menghadiri kegiatan tersebut yang menjadi salah satu tugasnya. Kegiatan pembinaan diubah menjadi tanggal 11 Oktober 2024 Pukul 08.00 WIT. Kemudian kegiatan pembinaan ditunda kembali dikarenakan adanya HUT Bea dan Cukai pada 11 Oktober 2024.

III.3. Strategi Mengatasi Kendala

A. Kegiatan Praktik Tidak Sesuai Harapan

Sebagai alternatif, kegiatan praktik dialihkan ke pelabuhan peti kemas Yos Sudarso, Ambon, Maluku di mana personil dilatih untuk

mengidentifikasi dan memeriksa kontainer yang memuat barang. Meskipun tidak menggunakan kapal secara langsung, praktik ini tetap relevan karena proses identifikasi dan pemeriksaan peti kemas juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum kepabeanan. Personil dilatih untuk melakukan pengecekan fisik peti kemas, memverifikasi dokumen pengiriman, dan mengidentifikasi potensi penyelundupan atau pelanggaran lainnya. Alternatif ini tetap memberikan pengalaman praktis yang berguna bagi personil dalam menangani aktivitas perdagangan internasional, meskipun melalui media peti kemas di pelabuhan.

B. Beberapa Kegiatan Di tunda

Melaksanakan koordinasi kembali dengan pihak Bea dan Cukai Maluku. Hal ini dilakukan untuk menentukan tanggal dan waktu yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak dimana kedua pihak tidak berhalangan untuk hadir. Dengan dilaksanakannya koordinasi kembali dengan instansi Bea dan Cukai maka telah di dapatkan waktu pelaksanaan proyek perubahan yaitu pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 WIT.

III.4. Pengalaman Memimpin Proyek

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), saya mendapatkan pengalaman berharga dalam memimpin proyek perubahan dan menjalankan sebuah organisasi. Pendidikan ini memberikan wawasan dan manfaat yang sangat besar dalam memahami dinamika tim dan organisasi guna mencapai hasil yang optimal. Pengalaman memimpin proyek ini juga memperkuat kemampuan saya dalam beberapa aspek penting yang krusial untuk keberhasilan perubahan.

Salah satu aspek utama yang saya pelajari adalah pentingnya kerja sama tim. Kerja sama dalam tim memiliki banyak fungsi dan manfaat. Melalui sinergi yang kuat di antara anggota tim, perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai pribadi dapat terjadi secara positif. Tim juga berperan dalam membantu mendisiplinkan anggota lainnya melalui interaksi yang sehat dan konstruktif. Selain itu, tim menjadi sarana efektif dalam pengambilan keputusan bersama, merundingkan ide-ide, serta melakukan negosiasi ketika diperlukan. Saya merasakan betapa pentingnya latar belakang dan pengalaman anggota tim yang beragam, karena perspektif yang berbeda sering kali membawa ide-ide baru yang positif dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman ini membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif.

Selain pentingnya kerja sama, saya juga belajar bahwa memahami isu strategis adalah kunci dalam menjalankan proyek. Menghadapi masalah di lapangan membutuhkan pemahaman situasi secara faktual. Dengan memahami kondisi yang ada, seorang pemimpin dapat menentukan permasalahan yang muncul, sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Proses ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil, karena kebijakan yang didasarkan pada data yang akurat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Saya juga menyadari bahwa pemahaman yang mendalam tentang situasi di lapangan memungkinkan kita untuk menetapkan tolak ukur yang jelas dalam menjalankan kebijakan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Strategi komunikasi juga menjadi elemen penting dalam pengalaman saya memimpin proyek. Mengelola komunikasi yang baik antara anggota tim dan pemahaman karakter setiap anggota sangat diperlukan untuk membangun organisasi yang efektif. Setiap anggota memiliki kepribadian dan potensi yang berbeda-beda, dan sebagai pemimpin proyek, saya perlu memiliki kepekaan terhadap potensi tersebut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota, saya dapat menugaskan mereka sesuai

dengan kemampuan terbaik mereka. Ini tidak hanya mempermudah pengelolaan organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan proyek.

Selama menjalankan proyek, saya juga sering menghadapi situasi di mana keputusan cepat dan tepat sangat diperlukan. Sebagai pemimpin proyek, saya menyadari bahwa kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, namun tetap berdasarkan analisis yang tepat, adalah hal yang sangat penting. Keputusan yang baik selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang permasalahan dan didukung oleh data serta informasi yang akurat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan proyek. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu berpikir cepat namun tetap berhati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil akhir.

Lebih jauh lagi, pengalaman memimpin proyek ini juga memperkuat kemampuan saya dalam membangun hubungan yang baik, baik dengan anggota tim maupun dengan *stakeholder* eksternal. Membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, termasuk instansi terkait seperti Bea Cukai dan instansi maritim lainnya, mempermudah proses kerja sama. Sinergi yang terjalin dengan baik antara *stakeholder* internal dan eksternal memungkinkan visi dan misi proyek dapat dipahami dan dilaksanakan dengan lebih baik oleh semua pihak. Hal ini juga mempermudah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan. *Stakeholder* yang terlibat dalam proyek ini bukan hanya pendukung pelaksanaan, tetapi juga memberikan masukan yang berharga dalam menyesuaikan strategi yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa seorang *Project Leader* harus memiliki kompetensi dalam berbagai aspek, mulai dari

manajemen tim hingga kemampuan bernegosiasi dan membangun hubungan baik dengan *stakeholder*. Pengalaman ini telah membantu saya menjadi lebih adaptif dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan, serta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan penting yang memengaruhi keberhasilan proyek.

Secara keseluruhan, pengalaman memimpin proyek perubahan ini memperkaya keterampilan saya dalam manajemen organisasi dan pengambilan keputusan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sinergi dan kerja sama dalam mencapai keberhasilan. Melalui proses ini, saya belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih responsif, adaptif, dan strategis dalam mengelola tim dan proyek, serta siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Realisasi proyek perubahan ini merupakan hasil dari dukungan dan kerja sama yang kompak antara *stakeholder* internal terutama personel KP. Yudistira-8003 dan *stakeholder* eksternal, khususnya Bea Cukai Maluku. Sinergi antara kedua pihak menjadi landasan utama yang memungkinkan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana. Dukungan dari Bea Cukai yang berperan sebagai mitra utama dalam penyediaan pembinaan dalam bidang kepabeanan memperkuat kapasitas Ditpolair dalam menghadapi berbagai pelanggaran di perairan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek perubahan membutuhkan komitmen lintas instansi yang tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga pada pembinaan berkelanjutan.

Proyek ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota Ditpolair dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang kepabeanan. Pembinaan yang dilakukan mencakup aspek teori dan praktik yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, memungkinkan personil Ditpolair untuk menjalankan tugas dengan lebih profesional. Mereka kini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang proses pemeriksaan kapal, identifikasi barang yang berpotensi ilegal, dan prosedur penegakan hukum yang sesuai. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas patroli, tetapi juga membangun kepercayaan diri personil dalam menjalankan tugas kepabeanan.

Selain meningkatkan keterampilan, proyek perubahan ini juga berfokus pada penyediaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional

Ditpolair. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, pelatihan yang diberikan menjadi lebih bermanfaat dan dapat diterapkan di lapangan. Pembinaan yang melibatkan Bea Cukai memberikan pemahaman mendalam mengenai metode identifikasi pelanggaran kepabeanan, memungkinkan personil untuk lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Penyesuaian pelatihan dengan konteks operasional Ditpolair membantu personil beradaptasi dengan situasi sesungguhnya di perairan, sehingga tugas patroli dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai standar.

Proyek ini juga sekaligus menjadi momen untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Ditpolair dan Bea Cukai, membangun hubungan yang lebih erat dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia. Dengan adanya sinergi yang kuat, koordinasi dalam penanganan pelanggaran hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Kerja sama ini juga membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut di masa depan, baik dalam hal pengawasan maupun pembinaan personil. Kesuksesan proyek perubahan ini mencerminkan pentingnya integrasi antar-instansi dalam mencapai tujuan bersama, sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keamanan nasional di wilayah perairan.

IV.2. Saran

Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan ancaman di perairan yang dihadapi semakin kompleks, ilmu dan kemampuan dalam penegakan hukum perairan sangat diperlukan. Instansi seperti PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Bakamla (Badan Keamanan Laut), Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dan KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) dapat memberikan dukungan khusus sesuai dengan tugas masing-masing, seperti pengawasan perikanan,

pengawasan dan pertolongan serta keselamatan pelayaran. Kerja sama yang terintegrasi antara Ditpolair, Bea Cukai, dan instansi lainnya akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut. Dengan sinergi yang kuat, setiap instansi dapat saling mendukung dan memperkuat patroli perairan sesuai kompetensinya.

Komunikasi yang lebih efektif dengan *stakeholder*, khususnya Bea Cukai dan instansi terkait, menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan operasi bersama. Menggunakan teknologi komunikasi terbaru, seperti platform digital untuk koordinasi, dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyampaian informasi. Selain itu, pertemuan rutin baik secara langsung maupun virtual dengan *stakeholder* akan mempererat hubungan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas serta tanggung jawab masing-masing. Dengan metode komunikasi yang efektif, respon terhadap ancaman dan pelanggaran di perairan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Perencanaan kegiatan yang lebih matang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan target proyek perubahan. Setiap tahapan program perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek operasional di lapangan, kebutuhan sumber daya, dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Melibatkan semua pihak sejak tahap perencanaan, baik *stakeholder* internal maupun eksternal, akan menghasilkan program yang lebih komprehensif. Perencanaan matang tidak hanya meminimalkan potensi kendala di lapangan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, sehingga proyek perubahan dapat mencapai hasil yang optimal.

LAMPIRAN 1
SURAT PERINTAH TIM EFEKTIF

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 2101 /IX/HUK.6.6./2024

Pertimbangan: bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/VII/DIK.2.5./2024/SSDM tanggal 24 Juni Tahun 2024 tentang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024;
2. surat perintah ini berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai dengan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Korpolaairud Baharkam Polri;

4. melaksanakan

2 SURAT PERINTAH KAKORPOLAIRUD
NOMOR : SPRIN/ 2101 /IX/HUK.6.6/2024
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2024

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 September 2024

a.n. KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
DIRPOLAIR
SELAKU
PELAKSANA HARIAN



HERO HENRIANTO BACHTIAR, S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELATIHAN
KEPIMPINAN NASIONAL (PKN) TK.II ANGKATAN XXXI T.A. 2024

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1.	HENI MULYONO, S.T.	AKBP/ 71050435	DAN KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	PROJECT LEADER	
2.	JUNAIDI, S.ST.	KOMPOL/ 75070213	KKM KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	KETUA TIM EFEKTIF	
3.	ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr.Pel.	IPTU/ 96061330	PS. PANAT I KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	SEKRETARIS	
4.	BOWO KURNIAWAN, S.H.	IPDA/ 81020539	PS. PATEK I KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	
5.	UUS RONI HENDRATA	AIPDA/ 83091036	PS. PANAT II KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	
6.	ENDA SUTISNA	AIPDA/ 85090120	PS. PAKOMLEK KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	
7.	VINSENSIUS LIBERIUS WANGGA, S.H.	BRIPKA/ 90040211	PS. PANAT III KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	

8. DADANG

2

1	2	3	4	5	6
8.	DADANG HERMAWAN	BRIPKA/ 80050384	PS. PATEK II KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	
9.	DIMAS TEGAR SUGIARTA	BRIPDA/ 04010117	BANAT KP. YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 September 2024

a.n. KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
DIRPOLAIR
SELAKU
PELAKSANA HARIAN



HERO HENRIANTO BACHTIAR, S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN 2
SURAT PERMOHONAN NARASUMBER



DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI YUDISTIRA – 8003

Ambon, **23** September 2024

Nomor B / **39** / IX / 2024 / POL-8003
Klasifikasi Biasa
Lampiran delapan belas lembar
Perihal Permohonan Narasumber dan Pelatihan dalam
rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN
T K. II Angkatan XXXI T.A. 2024 Di Pusdikmin

Kepada,

Yth. Kepala Kantor Wilayah Bea dan
Cukai Maluku

di

tempat

1 Rujukan

- a. Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri Nomor Sprin/1925/VIII/OPS.1.2./2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang tugas KP Yudistira – 8003 melaksanakan kegiatan kepolisian yang operasionalnya dikendalikan Korpolarud Baharkam Polri dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Maluku selama 30 hari T.M.T 1 September 2024 s.d 30 September 2024,
- b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B / 11312 / VII / DIK.2.5. / 2024 / SSDM tanggal 24 Juli 2024 tentang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mendukung Proyek Perubahan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.II Angkatan XXXI T.A. 2024 di sampaikan dengan hormat kepada Ka. permohonan personel Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku sebagai narasumber dan pelatihan untuk memberikan wawasan berupa teori dan praktek terkait pemeriksaan dan penegakan hukum di ruang lingkup kepabeanaan di KP Yudistira-8003, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



LAMPIRAN 3

SURAT BALASAN PERMOHONAN NARASUMBER



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU**

JALAN BENTENG KAPAHAPA, AMBON, MALUKU 97124
TELEPON (0911) 344529; FAKSIMILE (0911) 344348; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

Nomor : S-58/WBC.19/2024 30 September 2024
Sifat : Biasa
Hal : Jawaban atas Permohonan Narasumber dan Pelatihan Dalam Rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN T.K.II Angkatan XXXI T.A 2024 di Pusdikmin

Yth. Komandan Kapal Yudistira - 8003

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/39/IX/POL-8003 tanggal 23 September 2024 hal Permohonan Narasumber dan Pelatihan Dalam Rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN T.K.II Angkatan XXXI T.A 2024 di Pusdikmin, dengan ini disampaikan nama pegawai kami yang akan menjadi narasumber dalam acara dimaksud:

Nama / NIP : Wasis Jatmika / 197305131994021001
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Untuk memperlancar agenda tersebut kami sampaikan kontak narahubung atas nama Sdr. Fadel R. Tuasamu (WA 082248842362).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Sodikin



Tembusan:
Direktur Penindakan dan Penyidikan



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan Pusdikmin di Bandung, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


NAMA WASIS JATMIKA, S.Sos., M.M.
JABATAN KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
INSTANSI DITJEN BEA DAN CUKAI MALUKU

Bahwa untuk kepentingan institusi Polri khususnya Ditpolair Baharkam Polri, maka dengan ini saya memberikan dukungan penuh atas proyek perubahan dengan judul **"Strategi Penguatan Pembagian Personil Kapal Patroli Dipolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea Dan Cukai Dalam Bidang Kepabeanaan"** yang diajukan oleh:

NAMA HENI MULYONO, S.T
NRP 71050435
JABATAN KOMANDAN KP YUDISTRIRA-8003
INSTANSI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Demikianlah pernyataan dukungan ini saya buat dengan sesungguhnya, semoga proyek perubahan ini akan banyak membawa manfaat untuk institusi Polri khususnya Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri guna mewujudkan Polri yang Prestis.

Ambon, 05 Oktober 2024
Yang membuat Pernyataan



WASIS JATMIKA, S.Sos., M.M.



LAMPIRAN 5

SURAT TELEGRAM PERMOHONAN ANGGARAN PROYEK PERUBAHAN

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN						
				Bentuk..... REGISTRASI No.....		
FORMULIR BERITA						
Panggilan (petunjuk PA.HUB)	Jenis	No.	Derajat	Instr. Mengirim		
Y C I R 2	PLN	431	=	=		
DARI : DAN KP. YDR – 8003 KEPADA : KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI TEMBUSAN : 1. DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI 2. KASUBDIT PATROLIAIR 3. KASI KEU			Tgl/Waktu Pengunjukan : 10261015 WIT Tanda dinas : GRUP			
KLASIFIKASI : Nomor : T / 431 / X / 2024 TTK						
AAA TTK REFF TTK DUA SATU TTK PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2017 TTG SOTK PD TINGKAT MABES POLRI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DGN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2022 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2017 TTG SOTK PD TINGKAT MABES POLRI TTK DUA TTK SPRIN KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI NO.: SPRIN/1925/VIII/OPS.1.2./2024 TGL 30 AGUSTUS 2024 TTG TGS KP.YUDISTIRA – 8003 SUBDITPATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI MELAKS GIAT PENGAMANAN KEPOL DLM RANGKA MENGANTISIPASI PENINGKATAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DIWIL PER MALUKU KMA SLM 30 HARI TMT 01 S.D 30 SEPTEMBER 2024 TTK TIGA TTK SPRIN KAPOLRI NO.:ST/1913/IV/DIK.25./2024 TGL 24 JULI 2024 TTG MENGIKUTI PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXI TA 2023 PD TGL 29 JULI S.D 5 DESEMBER 2024 DIPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI KMA GEDEBAGE KMA BANDUNG KMA JAWA BARAT TTK BBB TTK SEHUB DGN REFF TSB DIATAS KMA DISAMPAIKAN KPD PIMPINAN BHW KOMANDAN KP.YUDISTIRA – 8003 AN HENI MULYONO,S.T PANGKAT AKBP NRP 71050435 GUNA Mendukung DIK PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL KRG BKA PKN KRG TTP TK II MENGAJUKAN ANGGARAN UNTUK PROYEK PERUBAHAN BERSUMBER DARI DIPa KORPOLAIRUD TA 2025 TTK CCC TTK DUM SBG LAP TTK HBS						
Tgl/Waktu pembikinan : 10261010 WIT						
PENGIRIM :		Derajat		Waktu	Per	Paraf
Nama	: HENI MULYONO, S.T	Aksi	Tembusan	Terima	Kirim	
Pangkat/Jab	: AKBP/DAN KP. YDR – 8003					
Tanda Tangan	: TTD					VC

RUANGAN DILUAR GARIS TEBAL HANYA UNTUK DINAS HUB.

LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KERJA TEKNIS

PERJANJIAN KERJA TEKNIS

Pada hari ini, 9 Oktober 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heni Mulyono, S.T
Alamat : Jl. RE Martadinata I No.1, Tj. Priok, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Jabatan : Komandan KP. Yudistira-8003.
Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

2. Nama : Wasis Jatmika, S.Sos., M.M.
Alamat : Jl. Benteng Kapaha, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
Jabatan : Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

1. Pihak Kedua menyediakan personil Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Maluku sebagai narasumber untuk mendukung kegiatan Pembinaan Personil KP. Yudistira-8003 Dalam Rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN T.K. II Angkatan XXXI Tahun 2024
2. Narasumber memberikan materi aspek teori dan praktek terkait pemeliharaan kemandirian di perairan dari sudut pandang Kepabeanan kepada Personil KP. Yudistira-8003.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Dukungan Narasumber Pembinaan Personil KP. Yudistira-8003 Dalam Rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN T.K. II Angkatan XXXI Tahun 2024 ini akan berlangsung selama 3 hari pada 11, 14 dan 15 Oktober 2024.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya pelaksanaan Dukungan Narasumber Pembinaan Personil KP. Yudistira-8003 Dalam Rangka Proyek Perubahan Pendidikan PKN T.K. II Angkatan XXXI Tahun 2024 akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan;
 - b. Menyediakan personil sebagai peserta kegiatan;
 - c. Menyediakan konsumsi kegiatan; dan
 - d. Menyediakan spanduk kegiatan;
2. Pihak Kedua
 - a. Menyediakan personil sebagai narasumber; dan
 - b. Menyediakan materi teori dan praktek.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, kerusuhan, atau keadaan lain yang berada di luar kendali para pihak, maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi ulang untuk mencari solusi yang terbaik.

Pasal 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka kedua pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



HENI MULYONO, S.T.
AKBP NRP 71050435

PIHAK KEDUA



WASIS JATMIKA, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN 7

DAFTAR HADIR PROYEK PERUBAHAN

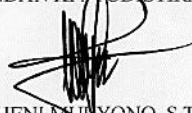
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI YUDISTIRA-8003

DAFTAR HADIR

Agenda **PROYEK PERUBAHAN**
 Hari / Tanggal **JUM'AT / 11 OKTOBER 2024**
 Waktu **08.00 s.d. SELESAI**
 Tempat **KP YUDISTIRA - 8003, AMBON, MALUKU**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WASIS JATMIKA	BEA CUKAI	KABID TINDAK & SIDIK	
2	MAHENDRA	BEA CUKAI	KASI TINDAK	
3	GUNARA	BEA CUKAI	KASI SIDIK	
4	HENI - RA	POLRI	KP-YUDISTIRA	
5	JUNADI	POLRI	KKM	
6	ADITYA BAGUS N	POLRI	PS PANAT I	
7	ENDAH SUTISNA	POLRI	PS. PAKOMLEK	
8	VINSENSIUS L.W	POLRI	PS. PANAT III	
9	GOVIN FIRMANA	POLRI	TANAT	
10	EGI EDHISA	POLRI	BANAT	
11	ILHAM RIDLO	POLRI	BANAT	
12	YUSRIADIN	POLRI	TANAT	
13	DIMAS TERAT	POLRI	BANAT	
14	FERY RIANTO	POLRI	BANAT	
15	PRIGI PRASETYO	POLRI	TANAT	

Ambon, 11 Oktober 2024
KOMANDAN KP. YUDISTIRA 8003

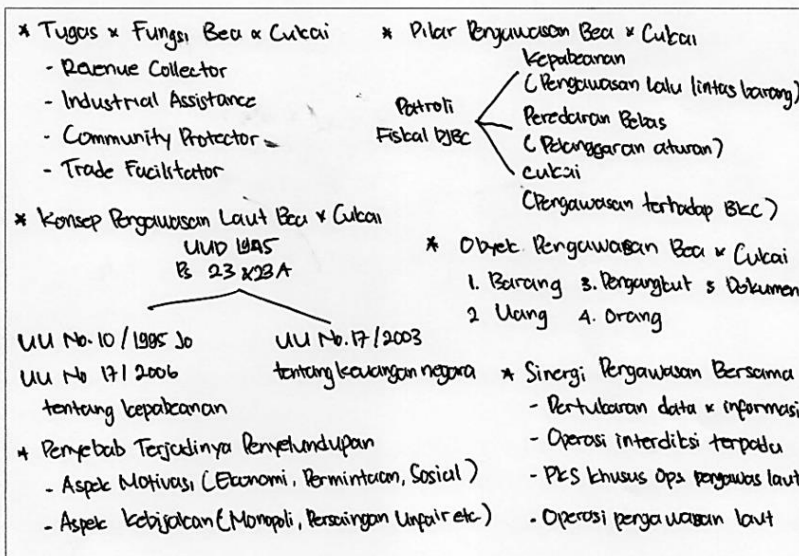

HENI MULYONO, S.T
AKBP NR. 71050435

LAMPIRAN 8
NOTULA PROYEK PERUBAHAN

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI YUDISTIRA-8003

NOTULA

Agenda **PROYEK PERUBAHAN**
 Hari / Tanggal **JUM'AT / 11 OKTOBER 2024**
 Waktu **09.00 s/d SELESAI**
 Tempat **KP YUDISTIRA-8003, AMBON, MALUKU**
 Narasumber **WASIS JATNIKA, S.sos., M.M**
 Instansi **DITJEN BEA DAN CUKAI MALUKU**



Notulis

VINSENSIUS LIBERIUS W. S.H
BRIPKA NRP 90040211

Mengetahui
KOMANDAN KP YUDISTIRA-8003

HENI MULYONO, S.T
AKBP NRP 71050435

LAMPIRAN 9

MARKETING PUBLIK PROYEK PERUBAHAN – BATAMINFO.CO.ID


BATAMINFO.CO.ID
Batam Tanjungpinang Karimun Bintan Anambas Lingga Kepri

Beranda > Info Update >

Info Update

Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Polisi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanan

Redaksi
Jumat, 11/10/2024 - 14:00 WIB



Fot. Isumewa

Bataminfo.co.id | Maluku – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan proyek perubahan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

Proyek bertajuk “Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Polisi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanan” yang dibuat oleh AKBP Heni Mulyono, S.T selaku Komandan KP. Yudistira 8003 ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personil Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, khususnya dalam menangani permasalahan kepabeanan yang sering muncul di perairan Indonesia.

Proyek ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan kerja sama lintas instansi antara Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Bea Cukai.

Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku sangat diperlukan untuk memastikan kesediaan dan keterlibatan sebagai narasumber utama dalam pelatihan merupakan tahap yang penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Ditjen Bea dan Cukai Maluku dipilih sebagai narasumber karena Bea Cukai memiliki kewenangan dan pengalaman mendalam, terutama dalam penegakan hukum kepabeanan.

Tah ini sangat penting bagi personil Ditpolair dalam memahami dan menjalankan tugas kepabeanan di lapangan. Keahlian dan wawasan dari Bea Cukai Maluku menjadi landasan penting dalam menyampaikan materi yang relevan bagi personil Ditpolair.

Kegiatan pembinaan diawali dengan penyampaian teori yang dipandu oleh Kepala Bidang Perindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Maluku. Dalam sesi ini, personil Ditpolair mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai berbagai aspek kepabeanan, termasuk regulasi terkait ekspor-impor, prosedur pemeriksaan barang, serta teknik identifikasi dan penyelidikan atas kasus pelanggaran kepabeanan.

Pembinaan teori ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi personil Ditpolair dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang akan mereka jalankan di lapangan.

Selanjutnya kegiatan teori, proyek dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan praktik yang juga dipimpin oleh Bea dan Cukai Maluku. Pada tahap ini, personil Ditpolair dilatih untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, termasuk teknik pemeriksaan kontainer dan barang-barang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana penyelundupan atau pelanggaran Bea Cukai.

Melalui pembinaan praktis ini, personil Ditpolair mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan tugas-tugas kepabeanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur Bea Cukai. Latihan langsung ini sangat penting karena memungkinkan personil Ditpolair untuk mengasah keterampilan teknis mereka dalam menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Ditpolair maupun Bea dan Cukai. Salah satu harapan utama adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan personil Ditpolair dalam menjalankan tugas-tugas kepabeanan.

Dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dari proyek ini, personil Ditpolair diharapkan lebih siap dan responsif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan pelanggaran hukum di laut, termasuk penyelundupan barang dan pelanggaran aturan kepabeanan.

Selain itu, proyek perubahan ini juga sekaligus menjadi momen untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Ditpolair dan Bea Cukai, sehingga kolaborasi yang efektif dapat terus terjalin dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

Melalui sinergi yang baik, kedua instansi diharapkan dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya bersama menegakkan hukum di laut. Dengan adanya hubungan kerja sama yang lebih erat, Ditpolair dan Bea Cukai akan mampu menghadapi tantangan penegakan hukum kepabeanan dengan lebih baik, sekaligus memastikan bahwa perairan Indonesia tetap aman dan terlindungi dari ancaman tindak pidana kepabeanan.(Pemdis: Heni)

f X P < >

LAMPIRAN 10

MARKETING PUBLIK PROYEK PERUBAHAN – KRIMINALITAS.CO.ID


Kriminalitas
TERKINI KEPRI NASIONAL CURANMOR NARKOBA CABUL CURAT

HOME > kepri > Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Polisi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanaan

Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Polisi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanaan

By Redaksi - October 11, 2024

[f](#) [t](#) [p](#) [e](#)



Kriminalitas.co.id ,Maluku – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan proyek perubahan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

Proyek bertajuk “Strategi Penguatan Pembinaan Personil Kapal Polisi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Bersama Instansi Bea dan Cukai dalam Bidang Kepabeanaan” yang dibuat oleh AKBP Heni Mulyono, S.T selaku Komandan KP. Yudistira-8003 ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personil Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, khususnya dalam menangani permasalahan kepabeanaan yang sering muncul di perairan Indonesia.

Proyek ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan kerja sama lintas instansi antara Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Bea Cukai.

Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku sangat dipertukan untuk memastikan kesediaan dan keterlibatan sebagai narasumber utama dalam pelatihan merupakan tahap yang penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Ditjen Bea dan Cukai Maluku dipilih sebagai narasumber karena Bea Cukai memiliki kewenangan dan pengalaman mendalam, terutama dalam penegakan hukum kepabeanaan.

Hal ini sangat penting bagi personil Ditpolair dalam memahami dan menjalankan tugas kepabeanaan di lapangan. Keahlian dan wawasan dari Bea Cukai Maluku menjadi landasan penting dalam menyampaikan materi yang relevan bagi personil Ditpolair.

Kegiatan pembinaan diawali dengan penyampaian teori yang dipandu oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Maluku. Dalam sesi ini, personil Ditpolair mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai berbagai aspek kepabeanaan, termasuk regulasi terkait ekspor-impor, prosedur pemeriksaan barang, serta teknik identifikasi dan penyelidikan atas kasus pelanggaran kepabeanaan.

Pembinaan teori ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi personil Ditpolair dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang akan mereka jalankan di lapangan.

Setelah kegiatan teori, proyek dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan praktik yang juga dipimpin oleh Bea dan Cukai Maluku. Pada tahap ini, personil Ditpolair dilatih untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, termasuk teknik pemeriksaan kontainer dan barang-barang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana penyelundupan atau pelanggaran Bea Cukai.

Melalui pembinaan praktis ini, personil Ditpolair mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan tugas-tugas kepabeanaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur Bea Cukai. Latihan langsung ini sangat penting karena memungkinkan personil Ditpolair untuk mengasah keterampilan teknis mereka dalam menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi Ditpolair maupun Bea dan Cukai. Salah satu harapan utama adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan personil Ditpolair dalam menjalankan tugas-tugas kepabeanaan.

Dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dari proyek ini, personil Ditpolair diharapkan lebih siap dan responsif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan pelanggaran hukum di laut, termasuk penyelundupan barang dan pelanggaran aturan kepabeanaan.

Selain itu, proyek perubahan ini juga sekaligus menjadi momen untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Ditpolair dan Bea Cukai, sehingga kolaborasi yang efektif dapat terus terjalin dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

Melalui sinergi yang baik, kedua instansi diharapkan dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya bersama menegakkan hukum di laut. Dengan adanya hubungan kerja sama yang lebih erat, Ditpolair dan Bea Cukai akan mampu menghadapi tantangan penegakan hukum kepabeanaan dengan lebih baik, sekaligus memastikan bahwa perairan Indonesia tetap aman dan terlindungi dari ancaman tindak pidana kepabeanaan. (Penulis: Heni)

LAMPIRAN 11

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

**BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : DADAN, S.H., M.H.;
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI;
NRP : 69040340;
Jabatan : KASUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI.
2. Nama : I WAYAN SUPARTHA YADNYA, S.I.K.;
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI;
NRP : 68060363;
Jabatan : KABAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI.

Dengan ini berkomitmen sepenuhnya untuk:

1. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi/operasional inovasi, termasuk pengalokasian anggaran;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, untuk menjamin bahwa proyek perubahan ini digunakan secara berkesinambungan.

Atas Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Administrasi Kepolisian Republik Indonesia yang digagas oleh HENI MULYONO, S.T. (Komandan KP. Yudistira-8003) dengan judul:

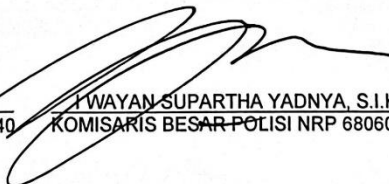
**Strategi Penguatan Pembinaan Personil
Kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri
Bersama Instansi Bea Dan Cukai Dalam Bidang Kepabeanaan**

Demikian surat komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2024

KASUBDIT PATROLIAIR

KABAGRENMIN




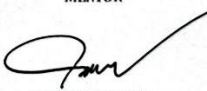
DADAN, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040340

I WAYAN SUPARTHA YADNYA, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68060363

LAMPIRAN 12

FORMULIR KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI

PROYEK PERUBAHAN

FORMULIR KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN				
No	MENTEE		MENTOR	
1	NAMA	: HENI MULYONO, S.T.	NAMA	: DADAN, S.H., M.H.
2	NRP	: 71050435	NRP	: 69040340
3	PANGKAT/GOL.RUANG	: AKBP	PANGKAT/GOL.RUANG	: KOMBES
4	JABATAN	: KOMANDAN KP. YUDISTIRA-8003	JABATAN	: KASUBDIT PATROLIAIR
5	UNIT KERJA	: KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	UNIT KERJA	: KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
TUJUAN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN				
TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	BASELINE TARGET	TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
JANGKA MENENGAH	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi Kelas A2 terkait proyek perubahan	Seluruh Kapal Polisi Kelas A2	Seluruh Kapal Polisi Kelas A2 berkoordinasi dan menerima pembinaan dari instansi Bea dan Cukai setempat	Mengadakan Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi Kelas A2
JANGKA PANJANG	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi terkait proyek perubahan	Seluruh Kapal Polisi	Seluruh Kapal Polisi berkoordinasi dan menerima pembinaan dari instansi Bea dan Cukai setempat	Mengadakan Sosialisasi proyek perubahan kepada Seluruh Komandan Kapal Polisi
FAKTA				
TAHAP	TARGET SKP	PROGRESS PENCAPAIAN TARGET	MASALAH/HAMBATAN	PENYEBAB
JANGKA MENENGAH	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi Kelas A2 terkait proyek perubahan	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi Kelas A2 terkait proyek perubahan belum terlaksana	Keterbatasan waktu	Tugas dan tanggung jawab yang padat
JANGKA PANJANG	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi terkait proyek perubahan	Sosialisasi proyek perubahan kepada seluruh Komandan Kapal Polisi terkait proyek perubahan belum terlaksana	Belum ada anggaran	Belum menjadi prioritas pimpinan
PELUANG				
Adanya PKS antara Baharkam dan Bea Cukai memudahkan koordinasi dalam proyek perubahan				
LANGKAH KE DEPAN				
TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH/HAMBATAN		
JANGKA MENENGAH	Mengadakan sosialisasi kepada seluruh komandan kapal polisi kelas A2	Menyampaikan manfaat dan pentingnya proyek perubahan kepada para komandan kapal kelas A2		
JANGKA PANJANG	Mengadakan sosialisasi kepada seluruh komandan kapal polisi	Menyampaikan manfaat dan pentingnya proyek perubahan kepada pimpinan dan meminta dukungannya		
 HENI MULYONO, S.T. AKBP NRP 71050435		Jakarta, November 2024 MENTOR  DADAN, S.H., M.H. KOMBES POL NRP 69040340		

LAMPIRAN 13

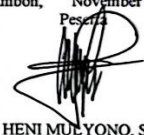
FORMULIR DIALOG TIM EFEKTIF DAN *STAKEHOLDERS*

FORMULIR DIALOG TIM EFEKTIF DAN <i>STAKEHOLDERS</i>				
No	Identitas Peserta			
1.	Nama	: HENI MULYONO, S.T.		
2.	NRP	: 71050435		
3.	Pangkat	: AKBP		
4.	Jabatan	: KOMANDAN KP. YUDISTIRA-8003		
5.	Unit Kerja	: KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI		

No.	Jenis Aktor / Peran	Identitas Aktor / Peran	Bentuk Dialog	Potensi Dukungan
1.	Tim Efektif	1. Kopol Junaidi, S. ST. 2. Iptu Aditya Bagus Narendra, S. Tr. Pel 3. Ipda Bowo Kurniawan, S.H. 4. Aipda Uus Roni Hendrata 5. Aipda Enda Sutisna 6. Bripta Vinsensius Liberius W., S.H. 7. Bripta Dadang Hermawan 8. Bripta Dimas Tegar Sugiarta	Tatap Muka	1. SDM 2. Perencanaan
2.	<i>Stakeholder</i> Internal	1. Kakorpolairud 2. Dirpolair 3. Kabag Renmin 4. Kasubdit Patroliair 5. Personil KP. Yudistira-8003	Tatap Muka	1. SDM 2. Keuangan 3. Perencanaan
3.	<i>Stakeholder</i> Eksternal	1. Ditjen Bea dan Cukai Maluku 2. <i>Platform</i> Surat Kabar <i>Digital</i>	Tatap Muka	1. SDM 2. Jasa

Ambon, November 2024

Peserta



HENI MULYONO, S.T.
AKBP NRP 71050435

LAMPIRAN 14
DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI TIM EFEKTIF



LAMPIRAN 15
DOKUMENTASI SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN KEPADA
ABK KP. YUDISTIRA-8003



LAMPIRAN 16
DOKUMENTASI SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN KEPADA
INSTANSI DITJEN BEA DAN CUKAI MALUKU



LAMPIRAN 17
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN ASPEK TEORI
BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI MALUKU



LAMPIRAN 18
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN ASPEK PRAKTEK I
BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI MALUKU



LAMPIRAN 19
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN ASPEK PRAKTEK II
BERSAMA INSTANSI BEA DAN CUKAI MALUKU

